

Peran diplomatik bangsa Indonesia dalam mendukung perdamaian Israel dan Palestina

Firdaus Maulana¹, Nasywa Fiqqā², Zahratul Hamidah³, Novita⁴

¹²³⁴Program Studi Ilmu Pengetahuan sosial, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang;
e-mail: Maulan887@gmail.com

Kata Kunci:

Perdamaian dunia, konflik, palestina, diplomasi, zionis israel, gencatan senjata

Keywords:

World peace, conflict, palestine, diplomacy, zionist israel, ceasefire

ABSTRAK

Dalam kebijakan luar negeri Indonesia, peran diplomatik Indonesia sangat penting untuk mendukung perdamaian antara Israel dan Palestina (Zaini et al., 2024). Indonesia telah menunjukkan komitmen kuat terhadap masalah Palestina sejak mendapat kemerdekaan, berdasarkan prinsip keadilan dan solidaritas. Indonesia aktif mendorong dialog dan negosiasi sebagai cara untuk menyelesaikan konflik yang telah berlangsung lama melalui berbagai forum internasional, seperti PBB dan organisasi regional. Indonesia juga berusaha meningkatkan kesadaran dunia tentang situasi kemanusiaan di Palestina dan mendukung upaya pembangunan yang berkelanjutan. Indonesia ingin menjadi jembatan antara kedua belah pihak dan mengajak masyarakat internasional untuk berpartisipasi dalam menciptakan kondisi yang mendukung perdamaian yang abadi melalui pendekatan yang inklusif dan kolaboratif. Studi ini akan memeriksa upaya diplomatik Indonesia dan tantangan yang dihadapinya untuk mendukung perdamaian di wilayah tersebut.

ABSTRACT

In Indonesia's foreign policy, Indonesia's diplomatic role is very important to support peace between Israel and Palestine. Indonesia has shown a strong commitment to the Palestinian issue since gaining independence, based on the principles of justice and solidarity. Indonesia actively promotes dialogue and negotiation as a way to resolve the long-standing conflict through various international forums, such as the UN and regional organizations. Indonesia also seeks to raise world awareness of the humanitarian situation in Palestine and supports sustainable development efforts. Indonesia wants to be a bridge between the two parties and invites the international community to participate in creating conditions that support lasting peace through an inclusive and collaborative approach. This study will examine Indonesia's diplomatic efforts and the challenges it faces in supporting peace in the region.

Pendahuluan

Konflik antara Israel dan Palestina merupakan salah satu konflik geopolitik paling panjang dan kompleks dalam sejarah dunia modern. Akar persoalan ini mencakup sejarah kolonialisme, pembagian wilayah pasca Perang Dunia II oleh kekuatan besar, serta persaingan ideologis dan klaim atas wilayah yang dianggap suci oleh tiga agama besar dunia (Widyatamaka, n.d.). Ketegangan antara kedua belah pihak telah berlangsung selama lebih dari tujuh dekade dan telah melibatkan berbagai bentuk kekerasan, pengungsi massal, hingga blokade ekonomi yang menimbulkan penderitaan luar biasa, terutama bagi rakyat Palestina. Meski komunitas internasional, termasuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), telah berulang kali mengupayakan solusi



This is an open access article under the CC BY-NC-SA license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

damai, hingga kini belum ada resolusi final yang dapat menyatukan kedua pihak dalam kesepakatan yang adil dan berkelanjutan.

Berbagai inisiatif telah diluncurkan untuk mencapai penyelesaian konflik, mulai dari Perjanjian Oslo pada 1993, hingga "solusi dua negara" (two-state solution) yang secara luas didukung oleh masyarakat internasional. Namun, pelaksanaan di lapangan kerap menemui jalan buntu karena perbedaan pandangan yang tajam, kebijakan permukiman ilegal Israel di wilayah pendudukan, dan melemahnya kepercayaan antar kedua pihak. Di tengah kompleksitas ini, komunitas internasional dituntut untuk terus memainkan peran aktif, termasuk negara-negara berkembang yang memiliki komitmen terhadap keadilan global, seperti Indonesia.

Indonesia, sebagai negara berpenduduk Muslim terbesar di dunia dan memiliki sejarah perjuangan panjang melawan penjajahan, menempatkan dukungan terhadap kemerdekaan Palestina sebagai prinsip moral dan politik luar negeri yang tak tergoyahkan. Dukungan ini tidak hanya berdasarkan solidaritas agama, melainkan juga berakar pada amanat konstitusi, khususnya dalam Pembukaan UUD 1945 yang menegaskan bahwa "kemerdekaan adalah hak segala bangsa." Oleh karena itu, Indonesia secara konsisten menolak segala bentuk penjajahan dan menegaskan hak penentuan nasib sendiri bagi rakyat Palestina sebagai prinsip yang tidak bisa ditawar.

Sejak masa awal kemerdekaannya, Indonesia telah menunjukkan dukungan terhadap perjuangan Palestina, baik melalui diplomasi bilateral maupun di berbagai forum multilateral seperti Organisasi Kerja Sama Islam (OKI), Gerakan Non-Blok (GNB), dan PBB. Kebijakan luar negeri Indonesia bersifat bebas dan aktif, yang berarti tidak berpihak namun aktif mendorong perdamaian dan keadilan global. Indonesia menolak keras berbagai bentuk kekerasan, baik oleh Israel maupun kelompok bersenjata Palestina, dan menekankan pentingnya perlindungan terhadap warga sipil sesuai prinsip-prinsip hukum humaniter internasional.

Salah satu tokoh kunci dalam pelaksanaan kebijakan luar negeri Indonesia saat ini adalah Menteri Luar Negeri, Retno Lestari Priansari Marsudi. Di bawah kepemimpinannya, Indonesia semakin memperkuat posisinya dalam mendukung perjuangan rakyat Palestina melalui diplomasi aktif dan tegas. Bu Retno, sapaan akrabnya, menjadi diplomat perempuan pertama yang menjabat sebagai Menlu Indonesia dan telah menjadikan isu Palestina sebagai salah satu prioritas utama diplomasi Indonesia di tingkat global. Dalam berbagai pertemuan internasional, ia secara konsisten menyuarakan pentingnya penghentian kekerasan, pengiriman bantuan kemanusiaan, dan dukungan terhadap pembentukan negara Palestina yang merdeka dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya.

Retno Marsudi juga aktif membangun kerja sama strategis dengan negara-negara anggota OKI dan GNB untuk menyatukan suara dalam mendesak Israel menghentikan agresinya. Di PBB, beliau menyampaikan secara terbuka posisi Indonesia yang menyerukan tanggung jawab komunitas internasional untuk segera bertindak menghentikan kekerasan dan mendorong dimulainya kembali proses perdamaian. Pada berbagai kesempatan, Retno menegaskan bahwa Palestina bukan sekadar isu politik

luar negeri, tetapi juga cerminan komitmen moral Indonesia terhadap keadilan dan hak asasi manusia.

Di sisi lain, peran Indonesia juga terlihat dalam penyampaian bantuan kemanusiaan ke Palestina. Di bawah koordinasi Kementerian Luar Negeri, Indonesia telah mengirimkan bantuan dalam bentuk makanan, obat-obatan, dan tenaga medis ke wilayah terdampak, khususnya Gaza. Selain itu, Indonesia juga telah mendirikan rumah sakit Indonesia di Gaza sebagai bentuk dukungan konkret terhadap rakyat Palestina yang mengalami krisis kesehatan akibat blokade dan serangan militer.

Pembahasan

Sejarah munculnya konflik Palestina dan Israel

Deklarasi Balfour merupakan awal mula terjadinya konflik Palestina dan Israel. Pada 2 November 1917, Deklarasi Balfour secara resmi diumumkan (Nurjannah & Fakhruddin, 2019). Deklarasi tersebut dikenal sebagai "Deklarasi Balfour" karena nama orang yang menulisnya: Lord Balfour, Sekretaris Jenderal Luar Negeri, dan Kepala Lord (Lionel) Rothcild, yang merupakan kepala kehormatan Federasi Zionis di Inggris dan Irlandia. Surat deklarasi dalam bahasa Indonesia mengatakan bahwa Arthur James Blafoor sangat senang atas nama pemerintahan Inggris atas aspirasi zionis yang disetujui kabinet pemerintahan Inggris. bahwa pemerintahan Inggris secara positif menyetujui perlunya tanah air bagi orang Yahudi di Palestina dan akan berusaha untuk membantu mencapainya. Karena sudah jelas bahwa tidak ada hal-hal yang dapat mengganggu hak-hak dan kepercayaan penduduk non-Yahudi di negara ini.

Permintaan Chaim Weizmann, seorang Yahudi Inggris yang telah berkontribusi pada pembuatan formula senjata yang membantu memenangkan perang, memicu Deklarasi Balfour. David Lloyd George memberikan hadiah kepada Weizmann atas jasanya (Cleveland, 2004, p. 243). Saat Weizmann menginginkan wilayah untuk Yahudi, David Lloyd George merasa mampu memenuhi permintaan Weizmann dan memberikan Yahudi wilayah Uganda di Afrika. Namun, Weizmann menolak dan menginginkan sebuah wilayah Palestina untuk menjadi "rumah" bagi orang Yahudi. Ini karena sebelumnya ada Perjanjian Sykes-Picot yang memberi Inggris Palestina sebagai kompensasi atas kekalahan Turki Utsmani. Chaim Weizmann meminta perjanjian ini, yang akhirnya dikabulkan oleh David Lloyd George (Cleveland, 2004). Setelah Deklarasi Balfour dibuat, orang Yahudi, terutama Zionis, senang memiliki wilayah Palestina untuk diduduki. Sebaliknya, bangsa Arab yang tinggal di wilayah Palestina tidak senang dengan deklarasi tersebut.

Selain itu, disebutkan bahwa Nebukhadnesar menghancurkan dan melenyapkan kerajaan Bani Israel di Palestina pada tahun 586 SM. Setelah Nebukhadnesar, beberapa kerajaan dari luar menguasai Palestina: Babilonia antara tahun 586 dan 538 SM, Persia antara tahun 538 dan 330 SM, Yunani antara tahun 330-200 SM, Dinasti Seleucid antara tahun 200 dan 167 SM, Dinasti Seleucid dan Maccabee antara tahun 167 dan 63 SM, dan Imperium Romawi antara tahun 200 dan 63 SM. Mereka membutuhkan area yang lebih luas. Setelah itu, teror terhadap masyarakat Palestina meningkat. berlanjut. Pada lepas 9 April 1948, milisi Irgun melakukan pembantaian massal yang menewaskan 259 orang.

Pada 14 Mei 1948, orang Yahudi mendeklarasikan negara Isra-fel sebagai negara mereka sendiri. Mereka ingin negara mereka berdiri sendiri di atas tanah yang akan didiami Palestina, dengan populasi Yahudi saat itu hanya 56.000, sedangkan populasi Palestina saat itu mencapai satu juta. Seiring dengan tekanan yang dilakukan oleh pemerintah Israel, persaingan ini terus berlanjut. Tentara Israel menyerang Ramallah di Tepi Barat Palestina.

Tentara Israel memulai blokade Ramallah dengan mengirim anggota Batalion Egoz. Mereka memburu warga Palestina terutama yang dianggap teroris, dan para petinggi pemerintah Palestina juga meradang. di kota itu, sejak tahun 1996, setelah otoritas Palestina di bawah Arafat ditarik oleh pasukan Israel, menjalankan roda pemerintahan layaknya negara. Kota ini dipilih sebelum Yerussalem, kota abadi Palestina, dibangun. Pasukan Israel menyerang langsung Tepi Barat. Dalam waktu singkat, Kota Jenin, Tulkarem, Betlehem Qalqilya, dan Nablus di Tepi Barat secara resmi berada di bawah kontrol Israel. Masyarakat Palestina yang merasa terisolasi dari tempat mereka tinggal selama berabad-abad tidak tinggal diam. Mereka terus berperang dengan Israel, yang menyebabkan perang tahun 1948, 1967, dan 1971. Cattan menyatakan bahwa undang-undang internasional tidak membenarkan hal ini. Dia juga menyatakan bahwa mengaitkan dengan sejarah lama (titel sejarah atau hak sejarah) tidak benar. Kedua istilah ini lebih berkaitan dengan memperoleh hak teritorial negara.

Dalam perjuangan mereka untuk merebut kembali wilayah mereka, warga Palestina bergabung dengan PLO. Pada bulan September 1982, terjadi pembantaian besar-besaran pengungsi Palestina di kamp evakuasi Sabra dan Shatila, yang menewaskan 2700 orang dalam waktu 24 jam. Akhirnya, rakyat Palestina membentuk milisi yang dikenal sebagai Intifada. Perlawanan yang berasal dari warga Palestina telah berlangsung sejak tahun 1987. yang mencerminkan keinginan sebenarnya masyarakat; dan bekerja sama dengan Inggris untuk mencapai kesepakatan yang akhirnya akan memungkinkan Palestina untuk dimerdekaan. Israel sendiri berusaha meredam dengan berusaha memberikan konsensi pada perjanjian Oslo pada tahun 1993, sebuah kesepakatan antara Israel dan Palestina yang akan memberikan kesempatan bagi Palestina untuk mendapatkan kemerdekaan. Namun, upaya ini gagal karena perjanjian tersebut dianggarkan oleh Israel, yang bertentangan dengan permintaan Palestina untuk kemerdekaan dengan berdirinya Palestina pada Tepi Barat dan Jalur Gaza dengan ibukota Yerusalem Timur.

Konflik dan kekerasan antara Israel dan Palestina mencerminkan dinamika geopolitik yang kompleks serta minimnya efektivitas lembaga internasional dalam menyelesaikan sengketa tersebut(Hadiat, 2022). Dengan menggunakan kekuatan militer yang berfungsi, Barat menjauhkan tanah dan sumber daya alamnya dari rakyat Palestina. Sebagaimana diketahui, konflik antara Israel-Palestina telah berlangsung semenjak negara Israel didirikan di atas tanah Palestina yang pada saat itu de facto didiami oleh populasi Arab (Billah et al., 2023). Di akhir September 2001, perlawanan Intifada yang bergolak menyelesaikan konflik antara Palestina dan Israel. Kehadiran Ariel Sharon, yang dianggap bertanggung jawab atas pembantaian yang terjadi di kamp pengungsian, menjadi sumber pergolakan ini. Setelah bentrokan, tujuh orang Palestina tewas di Mesjid Al Aqsa. Sampai saat ini, konflik antara Palestina dan Israel terus

berlanjut. Perjanjian perdamaian berulang kali dibuat, tetapi selalu gagal karena pelanggaran.

Tantangan yang dihadapi Indonesia dalam menyelesaikan konflik Israel dan Palestina

Konflik Israel-Palestina merupakan salah satu konflik terpanjang dan paling kompleks di dunia yang hingga kini belum menemukan titik damai. Konflik ini melibatkan persoalan wilayah, identitas nasional, agama, dan pelanggaran hak asasi manusia.(Mudore, 2019) Sebagai negara dengan mayoritas Muslim terbesar di dunia dan sebagai negara yang memiliki prinsip politik luar negeri bebas-aktif, Indonesia memiliki kepentingan moral dan politik untuk mendukung kemerdekaan Palestina dan mendorong perdamaian. Namun, komitmen tersebut bukan tanpa tantangan. Upaya Indonesia dalam menyuarakan perdamaian seringkali terkendala oleh dinamika politik internasional, keterbatasan akses diplomatik, serta realitas konflik internal di Palestina sendiri.

Salah satu hambatan utama Indonesia dalam mendorong perdamaian antara Israel dan Palestina adalah ketiadaan hubungan diplomatik dengan Israel.(Firdaus & Yani, 2021) Hal ini membuat Indonesia tidak memiliki saluran komunikasi resmi untuk berdialog langsung dengan pihak Israel, baik dalam upaya negosiasi maupun dalam penyaluran bantuan kemanusiaan. Di sisi lain, upaya Indonesia untuk menekan Israel melalui jalur internasional juga sering terbentur oleh ketidakseimbangan kekuatan global, di mana Israel mendapatkan dukungan kuat dari negara-negara besar seperti Amerika Serikat dan beberapa negara Eropa. Dalam hal ini, posisi Indonesia sebagai negara berkembang membuat tekanan diplomatiknya sering kali tidak cukup kuat untuk memengaruhi keputusan besar dalam proses perdamaian.

Selain itu, konflik internal di tubuh Palestina sendiri menjadi tantangan tersendiri. Pertentangan antara dua faksi utama Palestina, Fatah di Tepi Barat dan Hamas di Gaza, menyebabkan fragmentasi kekuasaan yang menyulitkan tercapainya kesepakatan nasional Palestina secara menyeluruh. Upaya Indonesia dalam menjalin kerja sama atau memberikan bantuan harus disesuaikan dengan kondisi politik yang rumit ini agar tidak dianggap berpihak kepada salah satu kelompok. Perpecahan internal ini juga melemahkan posisi Palestina dalam diplomasi internasional, karena kurangnya kesatuan suara dalam menyuarakan hak-haknya di hadapan komunitas global.

Di sisi lain, tantangan juga datang dari aspek logistik dan keamanan dalam penyaluran bantuan kemanusiaan. Wilayah Gaza yang berada di bawah blokade ketat oleh Israel, serta seringnya terjadi serangan militer, menyebabkan pengiriman bantuan dari Indonesia melalui jalur langsung sangat sulit dilakukan. Bantuan biasanya harus melalui negara ketiga seperti Mesir atau melalui organisasi internasional, yang memperlambat proses distribusi dan menambah risiko ketidaktransparan dalam pengelolaan bantuan. Bahkan relawan kemanusiaan Indonesia pernah mengalami kesulitan dan hambatan fisik saat ingin memasuki wilayah konflik, seperti yang dilaporkan oleh tim MER-C dan organisasi kemanusiaan lainnya.

Untuk mengatasi berbagai tantangan tersebut, Indonesia menempuh strategi diplomasi multilateral sebagai jalan utama dalam mendukung perdamaian Israel-Palestina. Dalam forum-forum internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB),

Organisasi Kerja Sama Islam (OKI), dan Gerakan Non-Blok (GNB), Indonesia secara konsisten menyuarakan pentingnya menghentikan kekerasan, membangun dialog, dan mewujudkan solusi dua negara (two-state solution). (Firdaus & Yani, 2021) Diplomasi multilateral ini memungkinkan Indonesia untuk membangun aliansi dengan negara-negara lain yang juga mendukung Palestina, sekaligus memperkuat tekanan moral dan politik terhadap Israel agar menghentikan pendudukan ilegal dan kekerasan terhadap rakyat Palestina.

Indonesia secara konsisten memperjuangkan kemerdekaan Palestina dengan memanfaatkan diplomasi parlementer untuk meningkatkan perannya dalam upaya internasional yang mendukung pembentukan negara Palestina yang Merdeka (Ayun et al., 2024). Selain melalui jalur diplomatik, Indonesia juga terus memperkuat peran kemanusiaannya. Dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia telah membangun berbagai bentuk kerja sama kemanusiaan dengan organisasi lokal maupun internasional untuk menyalurkan bantuan kepada rakyat Palestina. Salah satu contohnya adalah pembangunan Rumah Sakit Indonesia di Gaza oleh MER-C, yang menjadi simbol nyata solidaritas rakyat Indonesia terhadap Palestina. Pemerintah Indonesia juga memberikan bantuan berupa obat-obatan, makanan, dan dana melalui UNRWA (Badan PBB untuk Pengungsi Palestina). Meskipun menghadapi hambatan akses, pendekatan ini tetap dilanjutkan dengan hati-hati dan strategis melalui jalur-jalur yang memungkinkan.

Tak hanya dalam bentuk bantuan fisik, Indonesia juga menempuh strategi soft power melalui pendidikan dan penguatan kapasitas sumber daya manusia Palestina. Pemerintah memberikan beasiswa bagi mahasiswa Palestina untuk melanjutkan pendidikan tinggi di Indonesia, terutama di bidang hubungan internasional, teknik, dan kesehatan. Hal ini bukan hanya bentuk bantuan jangka pendek, tetapi juga merupakan investasi jangka panjang dalam membangun masa depan Palestina yang mandiri dan berdaya. Program-program pendidikan ini juga memperkuat hubungan bilateral dan solidaritas antarmasyarakat kedua negara.

Dengan berbagai upaya ini, Indonesia menunjukkan bahwa meskipun memiliki keterbatasan dalam kekuatan politik global, komitmen dan kreativitas dalam diplomasi serta kerja sama internasional tetap dapat memberikan dampak positif dalam mendukung perjuangan rakyat Palestina dan menciptakan fondasi perdamaian yang berkelanjutan. (Muhammad Irfan Gati & Abd. Hafid, 2024)

Konflik Israel-Palestina memang bukan persoalan yang mudah diselesaikan, terutama bagi negara seperti Indonesia yang tidak memiliki pengaruh langsung terhadap kedua pihak yang bertikai. Namun, semangat dan konsistensi Indonesia dalam mendukung Palestina tetap menjadi bagian penting dalam peta diplomasi internasional. Dengan pendekatan diplomasi multilateral, kerja sama kemanusiaan, dan pendidikan, Indonesia memainkan peran yang signifikan dalam mendorong perdamaian. Organisasi Konferensi Islam (OKI) telah berperan aktif dalam menyelesaikan konflik Israel-Palestina melalui berbagai pendekatan multilateral sejak 1969 (Roro, 2008). Meski dibayangi berbagai tantangan, komitmen terhadap prinsip keadilan dan kemerdekaan menjadi landasan moral Indonesia untuk terus berada di sisi Palestina dan perdamaian dunia.

Resolusi dan kebijakan diplomasi yang dilakukan indonesia dalam upaya menyelesaikan konflik

Dalam dunia yang penuh dengan konflik dan ketegangan geopolitik, pemeliharaan perdamaian telah menjadi tugas yang semakin mendesak. Perang saudara, konflik bersenjata, dan ketidakstabilan politik terus mengancam perdamaian global. Dalam upaya untuk mempertahankannya, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memainkan peran penting dalam menjaga perdamaian di seluruh dunia. PBB, atau Perserikatan Bangsa-Bangsa, adalah organisasi internasional yang dibentuk pada tahun 1945 setelah berakhirnya Perang Dunia II. PBB juga terlibat dalam misi-misi pemeliharaan perdamaian di seluruh dunia, mengirim pasukan perdamaian untuk membantu mengatasi konflik bersenjata, mengawasi gencatan senjata, dan mendukung rekonstruksi pasca-konflik (Arhanudya et al., 2023). Tujuan utama PBB adalah untuk menjaga dunia aman dan damai, mengatasi konflik, dan mendorong kerja sama antar negara. untuk memecahkan masalah yang ada di seluruh dunia.(Arhanudya et al., 2023)

Bangsa Indonesia secara resmi bergabung dengan PBB sejak tanggal 28 september 1950. Sebuah moment penting bagi bangsa Indonesia yang mana sebagai pengakuan penting internasional terhadap kadaulatan negara negara yang baru merdeka. Indonesia menjadi anggota negara ke 60 di PBB. Indonesia sendiri mempunyai sejarah yang panjang dengan PBB sempat keluar di tahun 1965 dan kembali lagi pada 1966 hingga kini pada masa pemerintahan presiden jokowi dan presiden prabowo Indonesia berperan aktif dalam musyawarah besar untuk mendukung perdamaian dunia. Hal ini sesuai dengan pembukaan UUD 1945 yang mana dituliskan penjajahan diatas dunia harus di hapuskan dan harus memperhatikan hak asasi manusia dalam sekala nasional maupun internasional. (Munawar, 2023) menyoroti bahwa Fatwa MUI No. 83 Tahun 2023 merupakan bentuk konkret dukungan umat Islam Indonesia terhadap perjuangan Palestina, sekaligus seruan moral untuk memboikot produk yang terafiliasi dengan Israel.

Konflik Israel dan palestina memiliki sejarah yang sangat panjang hingga kini,sering sekali konflik itu muncul kembali, agresi besar besaran Israel ke palestina pada tahun 2023 yang membuat banyak sekal mengorbankan nyawa orang orang yang tidak berdosa harus di renggut. Di gaza sendiri banyak anak anak yang kehilangan orang tuanya karena genosida yang terjadi disana. Hal ini membuat geram banyak negara yang ada di seluruh dunia. Pada saat konfrensi PBB masih zaman pemerintahan Presiden Jokowi Dodo beliau menyuruh menteri luar negeri ibu Retno Marsudi untuk menggaungkan perdamaian serta mengehentikan perang yang terjadi di Gaza karena sangat melanggar hak asasi manusia yang seharusnya mereka hidup dengan damai dan memiliki kebebasan sebagai mahluk sosial.

Kemudian juga di OKI (organisasi kerjasama islam) yang dimana untuk menyelesaikan konflik Israel dan Palestina (Puri & Yumitro, 2022). dalam organisasi ini khususnya di masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto beliau sendiri mengajak seluruh negara negara islam khususnya di timur tengah untuk bersatu mendukung perdamaian dan menciptakan tatanan dunia yang terhindar dari bencana perang. Karena jika negara negara timur tengah hanya sebagai penonton dan tidak ada rasa empati terhadap negara islam seperti palestina, hal ini sangat mengecewakan sebagai

sesame umat muslim. Presiden Prabowo juga mendukung dengan memberikan bantuan baik itu kebutuhan pokok maupun bantuan tenaga medis dari negara kita Indonesia untuk Gaza Palestina.

Pada moment terbaru disaat Indonesia menjadi tuan rumah ke 19 Persatuan parlemen Negara Negara Anggota OKI (PUIC). Dalam momentum itu,yang menandai juga sebagi 25 tahun berdirinya PUIC,Presiden Prabowo menegaskan pentingnya peran dunia islam dalam menyuarakan keadilan di tengah polarisasi,konflik dan ketidakpastian global. Menghadapi berbagai tantangan ke depan dan demi kepentingan umat manusia, presiden mengajak para pemimpin negara anggota OKI untuk menghidupkan kembali ajaran perdamaian yang menjadi esensi islam. Dalam pidatonya,predisen menekankan hanya dengan persatuan,kita dapat membela hak hak saudara kita di Palestina untuk merdeka,sekaligus menunjukkan bahwa islam bukan hanya membawa solusi melainkan juga menjadi rahmat bagi seluruh semesta.

Dari segala usaha diplomasi yang di lakukan oleh bangsa Indonesia ialah sebagai bentuk rasa cinta kami dan mengharapkan perdamaian di seluruh dunia. Perang hanya akan menyebabkan kehancuran yang menang maupun yang kalah akan sama kehilangan baik dari segi harta maupun keluarga,kami akan terus menyuarakan perdamaian baik lewat karya tulis ilmiah kami maupun lewat media sosial yang ada sehingga dukungan kepada mereka akan selalu ada. Ini merupakan komitmen bangsa Indonesia untuk berperan aktif dalam perdamaian dunia.

Kesimpulan

Indonesia memainkan peran penting dalam mendukung upaya perdamaian antara Israel dan Palestina melalui pendekatan diplomasi aktif yang berlandaskan prinsip keadilan, solidaritas, dan penolakan terhadap penjajahan. Sejak kemerdekaannya, Indonesia konsisten mendukung hak rakyat Palestina untuk merdeka dan berdaulat, serta menyerukan penyelesaian konflik melalui jalur damai. Indonesia menolak kekerasan dari kedua belah pihak dan mendorong implementasi solusi dua negara yang adil dan berkelanjutan. Di tengah tantangan global, seperti dampak ekonomi akibat konflik serta dinamika geopolitik internasional, Indonesia tetap teguh menyuarakan keadilan bagi Palestina di berbagai forum internasional, termasuk PBB dan OKI.

Melalui pidato-pidato diplomatik dan langkah kebijakan konkret, seperti sponsor terhadap resolusi PBB terkait status Palestina, Indonesia berupaya menjadi jembatan perdamaian dan penggerak solidaritas global. Konsistensi sejarah, diplomasi berkelanjutan, dan komitmen pada nilai kemanusiaan menjadi dasar kuat bagi peran Indonesia dalam mendukung perdamaian abadi antara Israel dan Palestina. Kami juga menuliskan artikel ini sebagai dukungan kita sebagai manusia yang mempunyai rasa kemanusiaan, agar menghentikan genosida di Gaza Palestina, mereka layak untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik dan kami mendukung akan kemerdekaan negara Palestina.

Daftar Pustaka

Arhanudya, R. C., Anwar, S., & Hadisancoko, R. E. (2023). KONTRIBUSI INDONESIA DALAM OPERASI PEMELIHARAAN PERDAMAIAAN PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA (PBB). 4.

Ayun, S. Q., Istifarin, A., Hidayatullah, A. D., & Soleh, B. (2024). Indonesia's Diplomatic Actions in the Israel-Palestine Conflict. *Jurnal Pertahanan: Media Informasi Tentang Kajian Dan Strategi Pertahanan Yang Mengedepankan Identity, Nasionalism Dan Integrity*, 10(2), 329–341. <http://repository.uin-malang.ac.id/21455/>

Billah, B. G. M., Hakim, Moh. J. M., & Bahruddin, U. (2023). Normalisasi Hubungan Uni Emirat Arab-Israel dan Dampaknya Terhadap Palestina. *Jurnal ICMES*, 7(1), 62–81. <http://repository.uin-malang.ac.id/15180/>

Firdaus, A. Y., & Yani, Y. M. (2021). Faktor Penghambat Perdamaian Konflik Palestina-Israel. *Populis: Jurnal Sosial Dan Humaniora*, 5(1), 104–110. <https://doi.org/10.47313/pjsh.v5i1.824>

Hadiat, F. N. (2022). Konflik Dan Kekerasan Israel Dan Palestina. *Tugas Terstruktur Mata Kuliah Lembaga Lembaga Internasional, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati*.

Mudore, S. B. (2019). Peran Diplomasi Indonesia Dalam Konflik Israel-Palestina. *Jurnal CMES*, 12(2), 170. <https://doi.org/10.20961/cmes.12.2.37891>

Muhammad Irfan Gati, & Abd. Hafid. (2024). Indonesia'S Diplomatic Contribution To the Israel-Palestine Conflict Since 1948. *JURNAL SULTAN: Riset Hukum Tata Negara*, 2(2), 1–9. <https://doi.org/10.35905/sultanhtn.v2i2.7919>

Munawar, F. A. A. (2023). Regarding Support for Palestine and The Call to. 17(83). <http://repository.uin-malang.ac.id/22961>

Nurjannah, E. P., & Fakhruddin, M. (2019). Deklarasi Balfour: Awal Mula Konflik Israel Palestina. *PERIODE: Jurnal Sejarah Dan Pendidikan Sejarah*, 1(1), 15–26.

Puri, C. N., & Yumitro, G. (2022). Peran Organisasi Kerjasama Islam (OKI) dalam Penguatan Diplomasi Islam. *Sospol*, 8(1), 96–108. <https://doi.org/10.22219/jurnalsospol.v8i1.19717>

Roro, M. S. P. (2008). Upaya organisasi konferensi Islam (OKI) dalam penyelesaian konflik Israel-Palestina (1969-2003). *Fisip Uai*.

Widyatamaka, E. R. (n.d.). *Two Perspectives in The Israeli-Palestinian Conflict in 2021 (Dua Perspektif dalam Konflik Israel Palestina 2021)*.

Zaini, N. M., Rachmat, A. N., & Oktaviani, J. (2024). KEBIJAKAN LUAR NEGERI INDONESIA TERHADAP KONFLIK ISRAEL-HAMAS TAHUN 2023-2024. *Global Insights Journal: Jurnal Mahasiswa Hubungan Internasional*, 1(1).